

**MEKANISME PERENCANAAN DALAM PEMBANGUNAN GAMPONG
GEUCEU MEUNARA, KECAMATAN JAYA
BARU KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ALMIRA RAIHAN

NIM. 170802009

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Almira Raihan
NIM : 170802009
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 26 April 1999
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Lr. V Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

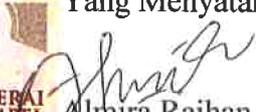
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain,
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Oktober 2023

Yang Menyatakan


Almira Raihan
NIM. 170802009



**MEKANISME PERENCANAAN DALAM PEMBANGUNAN
GAMPONG GEUCEU MEUNARA, KECAMATAN
JAYA BARU KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

ALMIRA RAIHAN

NIM. 170802009

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Dr. Mahmuddin, M. Si
NIP. 19721021997031002

Muazzinah, B.S c., MPA
NIP.198411252019032012

**MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG
GEUCEU MEUNARA, KECAMATANJAYA BARU
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

ALMIRA RAIHAN
NIM. 170802009

Telah diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada hari / Tanggal : Selasa, 23 April 2024 M
14 Syawal 2024 H

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris

Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP. 197210201997031002

Muazzinah, M.P.A
NIP. 198411252019032012

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si
NIP. 196110051982031007

Delfi Suganda, S.H.I., LL.M
NIP. 198611122015031005

Mengetahui

Dekan,



Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Peran pemerintah gampong dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur gampong yaitu berperan sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di gampong. Pembangunan infrastruktur desa menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur fisik adalah prasarana yang berbentuk secara fisik dan terlihat secara jelas dan mendukung kegiatan manusia. Infrastruktur gampong yang baik dan berkualitas akan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan pasar. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur gampong yang tangguh dan berkelanjutan. Infrastruktur non-fisik adalah prasarana yang tidak berbentuk secara fisik namun tetap mendukung dan bermanfaat bagi manusia. Infrastruktur non-fisik contohnya adalah adanya ketersediaan air bersih dari pemerintah, ada nyalayanan internet berbayar maupun gratis, adanya jaringan untuk menelpon, penyaluran sumber daya energi, mengalirnya listrik ke permukiman masyarakat, sistem drainase, dll. Dengan adanya mekanisme perencanaan sangat penting untuk diketahui agar masyarakat mengetahui alur dari sebuah pembangunan karna itu penelitian ini hadir untuk mengetahui peran pemerintah gampong dalam pembangunan infrastruktur di Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah gampong seperti keuchik, tuha peut gampong, kasi kesejahteraan serta pemerintah gampong lainnya sudah berperan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur gampong dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Sehubungan dengan mekanisme pembangunan tersebut maka dukungan dan bantuan dari masyarakat dalam pembangunan desa itu sendiri sangat berarti. Manfaat program yang akan dilaksanakan dalam pembangunan desa tergantung pada jenis dan tujuan program tersebut. Cara masyarakat desa memperoleh manfaat dari program pembangunan gampong adalah dengan berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pemerintah gampong sudah terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, namun dari pihak masyarakat kurang dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur gampong.

Kata Kunci : *Mekanisme Perencanaan, dan Pembangunan Gampong*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal berjudul “Efektivitas Perencanaan Dalam Pembangunan Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh”. Shalawat beserta salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada keluarga, para sahabat, dan para alim ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan proposal ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat guna penulisan skripsi dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan proposal ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak. MA., Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
3. Eka Januar, M. Soc., Sc. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Mirza Fanzikri, M.Si, Pembimbing akademik yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.

6. Ayah dan Ibu tercinta serta keluarga yang tanpa henti memberikan doa dan dukungan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu dengan tangan terbuka peneliti menerima segala saran dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak.

Akhir kata peneliti berharap semoga proposal skripsi ini bermanfaat untuk masyarakat dan dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca, serta apa yang telah disajikan dalam proposal ini mendapat keridhaan-Nya dan dapat bermanfaat. *Aamiin ya rabbal'alam.*

Banda Aceh, 23 April 2024
Peneliti,

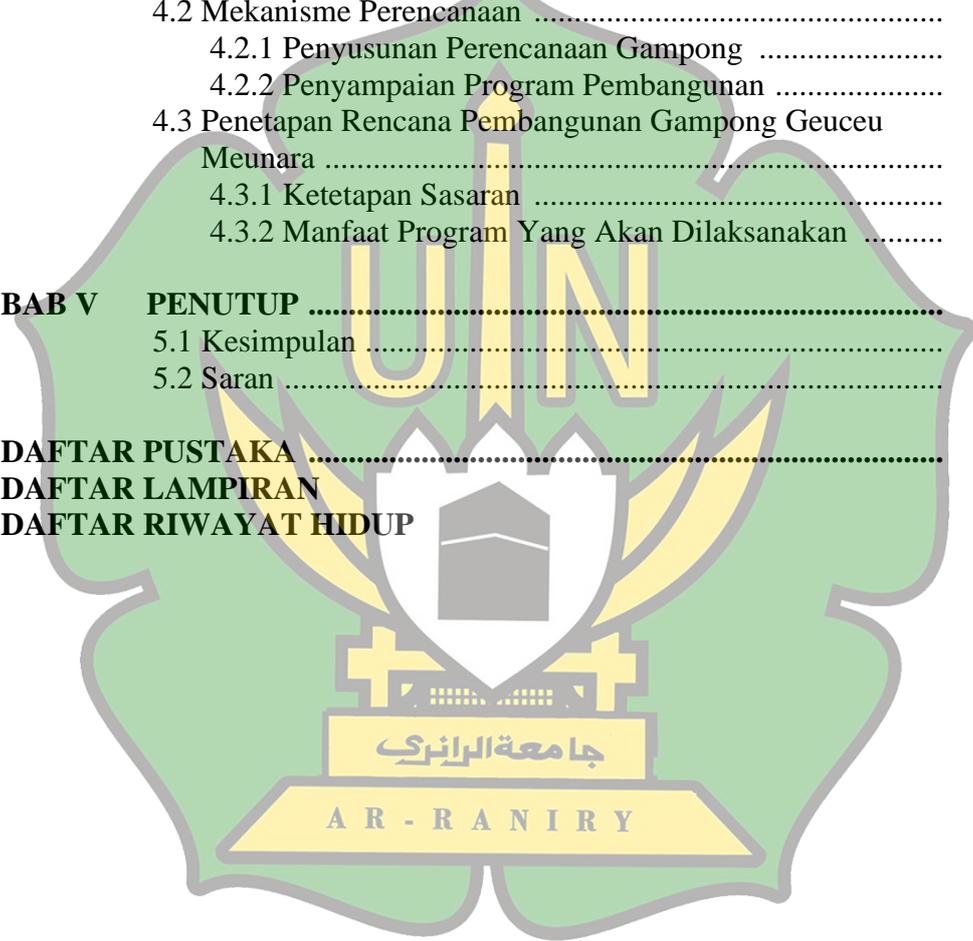
Almira Raihan
NIM. 170802009

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	8
1.2.1 Identifikasi Masalah	8
1.2.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Masalah	9
1.4 Gekunaan Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoris	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Perencanaan	10
2.1.2 Definisi Perencanaan	11
2.1.3 Mekanisme Perencanaan Pembangunan	11
2.1.4 Tahapan Perencanaan Pembangunan	11
2.2 Perencanaan Pembangunan Desa	14
2.2.1 Teori Pembangunan	15
2.2.2 Teori Penerapan N.I.R.Y	16
2.2.3 Penerapan Pembangunan	16
2.3 Gampong	17
2.3.1 Pemerintahan Gampong	18
2.4 Pembahasan dan Penelitian Yang Relevan	21
2.5 Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Pendekatan Penelitian	26
3.2 Pokus Penelitian	27
3.3 Lokasi Penelitian	28
3.4 Informan Penelitian	29
3.5 Jenis dan Sumber Data	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.7 Teknik Analisis Data	32

BAB IV	DATA DAN HASIL PELITIAN	35
	4.1 Gambaran Umum Gampong Geuceu Meunara.....	35
	4.1.1 Sejarah Singkat Gampong Geuceu Meunara	35
	4.1.2 Letak Geografis Gampong Geuceu Meunara	36
	4.1.3 Data Pembangunan Gampong Geuceu Meunara	37
	4.1.3.1 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	39
	4.1.3.2 Visi dan Misi Gampong	39
	4.1.3.3 Struktur Organisasi Gampong	40
	4.2 Mekanisme Perencanaan	42
	4.2.1 Penyusunan Perencanaan Gampong	42
	4.2.2 Penyampaian Program Pembangunan	47
	4.3 Penetapan Rencana Pembangunan Gampong Geuceu Meunara	52
	4.3.1 Ketetapan Sasaran	53
	4.3.2 Manfaat Program Yang Akan Dilaksanakan	55
BAB V	PENUTUP	64
	5.1 Kesimpulan	64
	5.2 Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	67
	DAFTAR LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Dimensi dan Indikator	28
Tabel 3.2	Dimensi dan Indikator	30
Tabel 3.3	Informan Peneliti	31
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Gampong Geceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota banda aceh	36
Tabel 4.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat Gampong Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	38
Tabel 4.3	Insfratraktur Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh	38
Tabel 4.4	Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Geuceu Meunara.....	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	25
Gambar 4.I	Peta Gampong Geuceu Meunara.....	37
Gambar 4.11	Struktur Organisasi Gampong Geuceu Meunara	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan salah satu hal yang penting yang menjadi permasalahan pokok di Indonesia, terutama pergamponan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang tepat didalam sebuah gampong dapat menambah keinginan masyarakat agar dapat lebih maju dan bisa bersaing dengan gampong-gampong lainnya agar bisa menjadi gampong yang terbaik dimata negara. Dalam hal ini perlu adanya campur tangan pemerintah dan juga kepala gampong yang cerdas dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap pengeluaran dana gampongtersebut.

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong Pasal 1 Ayat 8 menyebutkan bahwa pembangunan gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.¹

Agar pembangunan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan terarah maka sangat penting untuk dilakukan kegiatan perencanaan. Perencanaan dilakukan dengan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang

¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong

dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan seperti aparaturnegara sampai dengan kalangan masyarakat.

Mekanisme perencanaan pembangunan merupakan suatu ukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan mekanisme pembangunan tersebut maka dukungan dan bantuan dari masyarakat dalam pembangunan gampong itu sendiri sangat berarti. Dimana, masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga gampongnya. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan dari program pembangunan.

Pembangunan gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong. Dalam pembangunan pegampongan, infrastruktur merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang kemajuan gampong. Keteringgalan pembangunan berbagai infrastruktur sangat berpengaruh pada keterbatasan masyarakat gampong dalam berkomunikasi, produksi dan mengakses informasi terutama dalam menunjang kebutuhan masyarakat gampong. Hal ini merupakan hambatan dalam mengakses dan keterbatasan kemampuan. Pembangunan gampong bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakasa dan swadaya masyarakat gampong. Penduduk pegampongan adalah merupakan suatu potensi sumber daya manusi yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai subjek pembangunan karena sebagian penduduk di pegampongan di lihat dari aspek kualitas

masih perlu di lakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pegampongan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan pegampongan maupun pembangunan nasional.

Perencanaan yang disusun dalam sebuah pembangunan dapat diartikan pula sebagai alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang dibuat berdasarkan data dan fakta yang terjadi dilapangan sehingga dalam menyusun perencanaan pembangunan, dapat ditetapkan jenis program atau kegiatan apa yang harus dijadikan prioritas pembangunan digampong tersebut. perencanaan sangatlah penting karena merupakan pondasi awal dalam pelaksanaan pembangunan untuk itu perencanaan pembangunan harus disusun sebaik mungkin sehingga kegiatan yang akan dilakukan dalam pembangunan gampong setempat.

Ada dua hal yang harus dipahami dalam penyusunan perencanaan pembangunan gampong yaitu pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dengan jangka 6 (enam) tahun, maka RPJMG harus disusun secara tepat sasaran sesuai dengan aspirasi dari masyarakat, keadaan dan kebutuhan gampong setempat, kegiatan ini disebut dengan proses menggali gagasan dan aspirasi masyarakat serta mengenali potensi, masalah dan penentuan tindakan yang harus di lakukan terhadap Gampong tersebut. Kedua, Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sama halnya dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Untuk melakukan sebuah

kegiatan yang bertujuan untuk pembangunan Gampong, perlu dilakukan tahapan awal kegiatan pembangunan yaitu perencanaan untuk menetapkan prioritas kegiatan atau program yang akan dilaksanakan untuk menciptakan kehidupan masyarakat gampong yang lebih baik dari sebelumnya.

Perencanaan pembangunan Gampong biasanya meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG), Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang mengacu pada UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Gampong, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 144 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Gampong.²

Pembangunan infrastruktur desa menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur fisik adalah prasarana yang berbentuk secara fisik dan terlihat secara jelas dan mendukung kegiatan manusia. Infrastruktur gampong yang baik dan berkualitas akan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan pasar. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur gampong yang tangguh dan berkelanjutan.

Infrastruktur non-fisik adalah prasarana yang tidak berbentuk secara fisik namun tetap mendukung dan bermanfaat bagi manusia. Infrastruktur non-fisik contohnya adalah adanya ketersediaan air bersih dari pemerintah, ada nyalayanan internet berbayar maupun gratis, penyaluran sumber daya energi, mengalirnya listrik ke permukiman masyarakat, siste

² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong

m drainase, dll. Ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan gedung-gedung publik sangat diperlukan dalam meningkatkan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah serta memudahkan aksesibilitas masyarakat gampong terhadap layanan tersebut. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat gampong, seperti akses air bersih dan sanitasi yang layak, maka kesehatan dan kualitas hidup mereka dapat terjaga dengan baik. Selain itu, dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di gampong melalui pengembangan sektor perikanan, pertanian, dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta. Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur memperangaruhi *marginal productivity of provate capital*, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan - kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilitas makro ekonomi, yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat 3 huruf a yaitu pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Gampong, angka 6 tentang infrastruktur Gampong lainnya sesuai kondisi Gampong. Infrastruktur gampong seperti jalan,

jembatan, saluran air dan sebagainya harus di manfaatkan dan pemeliharaan infrastruktur yang lebih baik sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.³

Dari hasil observasi awal yang saya lakukan, program pembangunan infrastruktur yang ada di Gampong Geuceu Meunara terdapat pembangunan jalan gampong dan jalan besar menuju kota, pembangunan mesjid, pembangunan kantor keuchik, ada beberapa masalah minimnya penerapan dari mekanisme perencanaan pembangunan yang ada di gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, dan tidak tersedianya secara lengkap data gampong di Kantor Keuchik sehingga data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan rencana gampong masih menjadi tidak lengkap. Ada beberapa jalan gampong juga yang banyak berlubang jadi dapat menghambat masyarakat gampong melintasi jalan tersebut. Pengelolaan limbah rumah tangga juga harus dikembangkan lagi, karena dengan adanya pengelolaan limbah rumah tangga dapat meningkatkan kreativitas masyarakat gampong seperti ibu-ibu rumah tangga.

Peran pemerintah gampong dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur gampong yaitu berperan sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di gampong. Dalam hal ini pemerintah gampong juga menyusun perencanaan pembangunan gampong sebelum dilaksanakan pembangunannya. Setelah perencanaan pembangunan kemudian dilaksanakan pembangunan tersebut. Adapun sistematika terhadap pelaksanaan kegiatan

³ Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Gampong

pembangunan gampong yang di jabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 52 menjelaskan bahwa kepala gampong mengoordinasikan kegiatan pembangunan gampong yang dilaksanakan oleh perangkat gampong atau unsur masyarakat gampong. Pelaksanaan kegiatan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan gampong berskala lokal gampong, pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke gampong, pelaksanaan pembangunan gampong yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola gampong, kerjasama antar gampong atau kerjasama gampong dengan pihak ketiga, dan kepala gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB gampong.⁴

Peran pemerintah gampong disini yaitu untuk merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi hasil dari program dan pelaksanaan pembangunan gampong. Oleh karena itu penelitian tentang mekanisme perencanaan dalam pembangunan gampong ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dari perencanaan yang telah di susun dalam pembangunan Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh mengingat pemerintah Gampong sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur gampong seperti pembangunan gedung BUMG (Badan Usaha Milik Gampong), Pembangunan Mesjid Gampong dan infrastruktur lainnya.

⁴ Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Gampong

Permasalahan yang akan ditimbulkan apabila Perencanaan pembangunan gampong yang tidak maksimal ialah tidak terselenggarakannya perencanaan dalam pembangunan Gampong secara efektif serta tidak lengkap dan kurang akurat data yang digunakan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang menyebabkan ketidak merataan pembangunan di Gampong Geuceu Meunara. Maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian tentang “Mekanisme Perencanaan Dalam Pembangunan Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh”.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diketahui adanya beberapa permasalahan mengenai :

1. Minimnya penerapan dari mekanisme perencanaan pembangunan yang ada di Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.
2. Tidak tersedia secara lengkap data Gampong di kantor Keuchik sehingga data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan rencana Gampong menjadi tidak lengkap dan tidak akurat .

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme perencanaan dalam pembangunan di Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh ?

2. Bagaimana pemerataan pembangunan yang dilakukan di Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Pembangunan di Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru
Mengetahui Mekanisme perencanaan dalam pembangunan di Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Perencanaan dalam pemerataan, pembangunan di gampong geuceu meunara, kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoris

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan Ilmu Administrasi Negara, dan dengan penelitian ini dapat mengambil manfaat dari apa yang kita teliti.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini yaitu dijadikan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan informasi mengenai pentingnya perencanaan dalam pembangunan di suatu Gampong dan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi kantor Keuchik Gampong Geuceu Meunara dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan gampong secara lebih terarah sehingga menjadi lebih baik dari yang sebelumnya .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perencanaan

Secara umum terdapat dua unsur penting dalam perencanaan, yaitu hal yang ingin dicapai dan cara untuk mencapainya. Dalam proses perencanaan, kedua unsur tersebut baik secara eksplisit maupun implisit di muat pada berbagai nomenklatur seperti visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, proyek, aktivitas, dan lain sebagainya. Perencanaan juga harus dimaknai kinerja sosial budaya masyarakat yang selaras dengan kelestarian lingkungannya. Kedua hal terakhir ini menunjukkan bahwa didalam suatu proses perencanaan harus mempertimbangkan modal sosial (*sosial capital*) dan sumberdaya bersama (*common pool resources*) yang harus dikelola secara berkelanjutan.⁵

2.1.2 Definisi Perencanaan

Perencanaan adalah beberapa proses dimulai dengan sasaran-sasaran, kebijakan, batasan strategi, serta juga rencana terperinci untuk mencapainya, mencapai organisasi untuk menerapkan keputusan, serta juga termasuk tinjauan kinerja dan juga umpan balik terhadap pengenalan siklus perencanaan baru.

⁵ Perencanaan dan pembangunan wilayah, Erna rustiandi ddk, (Jakarta : yayasan pustaka obor, Indonesia 2017) hal. 4

perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk mencapai hasil yang di inginkan.⁶

2.1.3 Mekanisme Perencanaan Pembangunan

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka Daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat gampong/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat propinsi, termasuk menyelenggarakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Propinsi, Kabupaten dan Kota (Forum SKPD).

2.1.4 Tahapan Perencanaan Pembangunan

Ada 4 tahapan dalam proses pembangunan gampong, yaitu Perencanaan, Pembangunan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

1) Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Gampong yaitu tahapan awal yang dilakukan oleh pemerintah gampong yang didalamnya ikut terlibat Badan Permusyawaratan Gampong (BPD) serta masyarakat secara partisipatif untuk memanfaatkan semua sumber daya Gampong dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Perencanaan dalam Pembangunan Gampong disusun oleh Pemerintah Gampong sesuai dengan Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal

⁶ <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-perencanaan-menurut-para-ahli/>

Gampong dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Gampong dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan unsur dari masyarakat Gampong dan juga boleh didampingi oleh perangkat daerah kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong; dan/atau pihak lainnya.

Adapun proses perencanaan pembangunan gampong terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMDes) yang disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPDDes) yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Gampong, 4 tahapan dalam proses pembangunan gampong, yaitu Perencanaan, Pembangunan, pengawasan, dan pertanggungjawaban harus sudah ditetapkan. sedangkan untuk Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPDDes), disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan Pembangunan Gampong merupakan semua kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Gampong dan/atau kerja sama antar Gampong kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi. Pelaksanaan Pembangunan Gampong dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal gampong melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi melibatkan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong. Tahapan persiapan yang meliputi penetapan Pelaksana Kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan, pembekalan Pelaksana Kegiatan, pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan, penyiapan dokumen administrasi, pembentukan tim pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja, dan pengadaan bahan/material.

Selanjutnya, untuk tahap pelaksanaan pembangunan Gampong, Kepala Gampong mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi rapat kerja pelaksanaan kegiatan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, perubahan pelaksanaan kegiatan, penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah, pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan, dan pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

3) Pengawasan

Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Pembangunan Gampong dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Gampong seyogyanya juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif, hasil pengawasan dan pemantauan ini kemudian dapat menjadi dasar pembahasan dalam Musyawarah Gampong (Musdes).

4) Pertanggung Jawaban

Kepala Gampong menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setelah disetujui oleh BPD setiap

akhir tahun anggaran yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Gampong.

Jadi pada dasarnya seperti itulah tahapan tahapan dalam pelaksanaan pembangunan. Jika masih kurang jelas, bisa mencari referensi referensi dari berbagai media yang ada sekarang.⁷

2.2 Perencanaan Pembangunan Gampong

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Neri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Gampong, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan gampong adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Gampong dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Gampong dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya gampong dalam rangka mencapai tujuan pembangunan gampong.⁸

Perencanaan pembangunan gampong disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Gampong atau yang disebut RKP Gampong yang merupakan penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 tahun. RPJM Gampong dan RKP Gampong ditetapkan dengan peraturan gampong. RPJM Gampong ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala gampong. Sedangkan RKP Gampong mulai disusun oleh pemerintah gampong pada bulan Juli tahun berjalan.

⁷ <https://sidanegara.desa.id/index.php/artikel/2021/2/18/pembangunan-desa-tahapannya-bagaimana>

⁸ Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

2.2.1 Teori Pembangunan

Secara umum, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan (*sosial plan*) yang dilakukan oleh para birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses dalam upaya melakukan peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang saling berkesinambungan pada suatu tatanan kehidupan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sehingga terdapat beberapa cara dalam penentuan tingkat kesejahteraan pada suatu Negara. Beberapa pakar memberikan definisi pembangunan yang berbeda-beda seperti yang disebutkan oleh Siagian (1994), menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Dalam pengertian lain, Bintoro Tjokromidjojo berpendapat bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan bangsa dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.⁹

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus dilakukan untuk menuju perbaikan disegala bidang kehidupan masyarakat dengan berdasarkan pada seperangkat nilai yang dianut, yang menuntun masyarakat untuk

⁹ Kartono, Drajat Tri dan Hanif Nurcholis. Modul Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota. Hal. 1.5-1.7

mencapai tingkat kehidupan yang didambakan. Pembangunan menuntut orientasi masa depan bagi kelestarian manusia dan alam.¹⁰

Sehingga dari teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ialah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar dan berkesinambungan bahkan tidak ada ahir yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat disegala bidang dan aspek kehidupan masyarakat agar kedepannya terus menempati posisi yang lebih baik dari sebelumnya.

2.2.2 Teori Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Menurut Riant Nugroho penerapan pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Nugroho, 2003:158). Penerapan dapat dilaksanakan apabila keputusan yang ditetapkan sebelumnya sesuai dan selaras sehingga tujuan yang diinginkan organisasi dapat terlaksana.¹¹

2.2.3 Penerapan Pembangunan

Konsep pembangunan berkelanjutan tampaknya menjadi hal yang menjanjikan. Dalam pembangunan berkelanjutan, aspek pembangunan bukan hanya mengarah pada masyarakat masa kini melainkan juga masyarakat di masa depan. Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencakup berbagai aspek yang ada di

¹⁰ Bonaraja Purba ddk, *Ekonomi pembangunan* (Yayasan Kita Menulis, 2021). Hal. 6

¹¹ <https://repository.uin-suska.ac.id/bablandasanteori.pdf>

masyarakat juga masyarakat gampong. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Gampong Pasal 78 (1), pembangunan gampong, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat gampong.

Pembangunan berkelanjutan di gampong saat ini menerapkan prinsip-prinsip SDGs (*Sustainable Development Goals*) Gampong. SDGs Gampong sendiri merupakan program turunan dari SDGs yang dikeluarkan oleh PBB, yang memiliki 17 tujuan atau *goals*. Oleh karena itu pembangunan yang menerapkan SDGs Gampong, maka dapat membantu pencapaian pembangunan nasional berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.¹²

2.3 Gampong

Gampong merupakan hunian asli Aceh yang dikenal semenjak Aceh belum menjadi wilayah kesultanan. Gampong merupakan kesatuan wilayah hukum terendah yang lahir dari masyarakat asli aceh, Gampong muncul bahkan jauh sebelum munculnya mukim yang merupakan kumpulan beberapa Gampong yang ada di daerah aceh. Gampong sama halnya dengan *Nagari* di Minang.

¹² Dwi Agus Prastiwi et al., *Indeks Pembangunan Desa 2018*, ed. Masfufah, Tri Suryaningsih, and Akhsan Naim (Indonesia: Badan Pusat Statistik, 2019).

Gampong itu sendiri Tripa *Rekontruksi pemerintahan Gampong* Terbentuk pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1635), yaitu bagian terkecil dari susunan pemerintahan yang ada di Aceh. Pada masa itu, sebuah gampong terdiri dari kelompok-kelompok rumah yang letaknya berdekatan satu sama lain. Pimpinan Gampong disebut dengan *keuchik* atau *geuchik*, dan dibantu oleh seorang yang mahir dalam masalah keagamaan dengan sebutan *teungku meunasah*. Dalam sebuah gampong terdapat pula unsur-unsur pimpinan lain yang dinamakan *waki*, yang merupakan wakil dari keuchik serta juga disebut dengan *wreung tuha* (golongan orang-orang tua kampung yang disegani dan berpengalaman dalam kampungnya). Menurut tradisi, jumlah mereka ada empat dinamakan *tuha peut* dan ada juga yang delapan orang yang disebut *tuha lapan*.¹³

2.3.1 Pemerintahan Gampong

Pemerintah Gampong atau Gampong atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat gampong. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan gampong yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah gampong, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala gampong

¹³ Sulaiman Tripa, *Rekonstruksi Pemerintahan Gampong* (Banda Aceh:Bandar Publishing, 2019), hal. 8

yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.¹⁴

Kepala gampong mempunyai wewenang yaitu meliputi :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Gampong (BPD) atau Tuha Peut Gampong (TPG).
- b. Mengajukan rancangan peraturan gampong.
- c. Menetapkan peraturan gampong yang telah mendapat persetujuan bersama BPD/TPG.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan gampong mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBGampong) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD/TPG.
- e. Membina kehidupan masyarakat gampong.
- f. Membina perekonomian gampong.
- g. Mengoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif.
- h. Mewakili gampongnya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Adapun Tugas Pemerintah gampong/ Gampong :

¹⁴<https://id.wikipedia.org/>

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan gampong yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan gampong.
- g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan gampong.
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan gampong.
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di gampong.
- l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan gampong.
- m) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di gampong.

- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.¹⁵

2.4 Pembahasan Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan :

1. Ayu Rosita, Skipsi, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pegunungan Di Kabupaten Bone*. Berdasarkan penelitian dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa program pembangunan infrastruktur pegunungan di Gampong Tapong jika dilihat dari tiga indikator efektivitas mulai dari pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program tersebut sudah tepat waktu dan tepat sasaran. Untuk indikator yang kedua yaitu integrasi, dimana program tersebut sudah pernah disosialisasikan dalam musyawarah gampong. Pembangunan di Gampong Tapong bisa dikatakan efektif karena dilihat dari beberapa tahun belakangan ini, pembangunannya sudah meningkat, antara lain akses jalan, transportasi juga meningkat, karena pemerintah melakukan strategi pembangunan yang memfokuskan pada infrastruktur jalan terlebih dahulu sehingga pada tahap pembangunan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar tanpa menjadikan akses jalan sebagai kendala yang selama ini sering dijadikan permasalahan. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sama membahas soal efektivitas dalam pembangunan gampong/gampong, namun terdapat pula perbedaan dalam penelitian yaitu

¹⁵ <https://id.wikipedia.org>

penelitian di atas membahas tentang bagaimana efektivitas dalam melaksanakan program yang telah tersusun sedangkan yang peneliti bahas ialah mengenai efektivitas penyusunan perencanaan pembangunan sehingga perencanaan yang disusun akan memudahkan Gampong Geuceu Meunara dalam melakukan pembangunan.¹⁶

2. Marliana, Skripsi, *Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap RPJMG*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Teuku Umar, Meulaboh – Aceh Barat, hasil dari penelitian ini ialah partisipasi masyarakat Gampong Gunung Kleng terhadap rencana pembangunan jangka menengah gampong (RPJMG), bahwa masyarakat Gampong Gunung Kleng pada tahap perencanaan pembangunan jangka menengah gampong Gunung Kleng menunjukkan bahwa keaktifan masyarakat untuk berpartisipasi masih rendah, hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat dan pemberian bentuk aspirasi yang kurang efektif dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengawasan. Keikutsertaan masyarakat terhadap rencana pembangunan jangka menengah gampong yang kurang aktif, karena tidak semua masyarakat ikut serta dengan rencana yang akan disusun dengan alasan setian masyarakat memiliki kesibukannya masing-masing. Namun masyarakat tetap memiliki hak yang sepatutnya untuk memberikan aspirasinya dalam proses musyawarah perumusan rencana pembangunan jangka

¹⁶ Ayu Rosita "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Kabupaten Bone" (Makassar : UMM,2021) hal. 64

menengah gampong. Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah didalam penelitian yang dilakukan sama sama membahas tentang Perencanaan Pembangunan Gampong, namun terdapat pula perbedaan yaitu penelitian diatas lebih membahas tentang bagaimana partisipasi masyarakat gampong dalam keikutsertaannya atau paerisipasi masyarakat gampong dalam menjalankan perencanaan pembangunan gampong yang sudah disusun sebelumnya, sedangkan yang dibahas oleh peneliti ialah bagaimana efektivitas perencanaan pembangunan yang harus diterapkan agar tujuan dari pembangunan dapat tercapai dengan mudah dan tepat sasaran.¹⁷

3. Arif Zainudin, *Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Gampong Pengabean dan Gampong Karanganyar)* Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan bahwa, perencanaan pembangunan Gampong Pengabean dan Gampong Karanganyar lebih mengutamakan pem-berdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat Gampong. Pemberdayaan masyarakat Gampong digunakan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Gampong agar pemertaan ekonomi dapat terwujud dan menciptakan kemandirian Gampong. Model partisipasi yang digunakan oleh Gampong Karanganyar dan Gampong Pengabean dalam perencanaan pembangunan Gampong dengan melibatkan masyarakat Gampong dalam kegiatan musyawarah perencanaan pem-

¹⁷ Marlina, Skripsi “*Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap RPJMG (Aceh Barat:UTU,2013)*hal. 67

bangunan Gampong. Musyawarah tersebut pada penentuan program kerja atau prioritas kegiatan Gampong dan penentuan kebijakan anggaran.¹⁸

4. Mirza Fanzikri, *Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Gampong*. Dalam norma pasal 79 UU No 6/2014 tentang Gampong (UU Gampong) ditegaskan bahwa dokumen RPJM Gampong dan RKP Gampong menjadi satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan di gampong. Kedudukan dokumen perencanaan gampong yang kuat ini menyiratkan makna bahwa gampong ber-daulat secara politik untuk mengkonsolidasikan seluruh program/kegiatan pembangunan di gampong. Sinergi perencanaan pembangunan gampong tidak hanya dilakukan ke pihak eksternal, namun secara internal pun harus dilakukan. Misalnya, masa jabatan kepala gampong 6 tahun harus bersinergi dengan periode waktu RPJM Gampong. Peluang mensinergikan antar rencana program/kegiatan yang disediakan Permendagri 114/2014 bukannya tanpa tantangan. Pelembagaan musyawarah gampong (Musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan gampong (Musrenbangdes) berbeda secara tatakala dan tujuan dengan perencanaan pembangunan daerah. Perbedaan inilah yang musti segera dicarikan jalan keluarnya. Terlebih lagi saat ini sistem perencanaan pembangunan terdiri dari tiga bagian, yang satu dengan lainnya musti saling bersinergi dan terintegrasi.¹⁹

¹⁸ Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, Vol. 3 (1), April 2018 - 14 Arif Zainudin 1)*, Sri Sutjiatmi 2)

¹⁹ Mirza Fanzikri. *Integritas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa*. Kontruksi Administrasi Publik. Banda Aceh : UIN Ar-raniry (2019). Hal-93-121.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan, yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian. Ahli pertama yang menjelaskan pengertian kerangka berpikir adalah Dijelaskan bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting.²⁰



Sumber: Diolah Peneliti 2022

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

²⁰ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.nm_____2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupakata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.²¹

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif (*Descriptive Qualitative Research*), dimana peneliti melakukan penelusuran lapangan secara nyata untuk memperoleh gambaran terhadap Efektivitas dari perencanaan pembangunan yang ada di Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota

²¹ Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hal.9

Banda Aceh. Penelitian ini di laksanakan untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan.

Mengacu pada pendapat Rukin mengatakan bahwa penelitian kualitatif dan penelitian sosial memiliki ciri sebagai berikut :

1. Sisitematis, artinya sesuai dengan logika, masuk akal, benar menurut penalaran.
2. Empiris, artinya diperoleh dari pengalaman, penemuan, pengamatan dari lapangan penelitian.
3. Metodis, artinya berdasarkan metode yang kebenarannya diakui oleh penalaran.
4. Umum, artinya menggeneralisasi, meliputi keseluruhan dan tidak menyangku yang khusus saja.
5. Akumulatif, artinya bertambah terus, makin berkembang, dinamis.²²

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dilaksanakan sesuai judul penelitian yaitu Mekanisme Perencanaan Dalam Pembangunan Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Secara umum suatu penelitian yang akan dilakukan sudah direncanakan sedemikian rupa sesuai dengan fokus, namun fokus suatu penelitian dapat berubah dengan sendirinya dan berkembang sesuai kondisi dilapangan melalui penyelarasan perkembangan dari fokus permasalahan penelitian yang dibuat melalui identifikasi dan rumusan masalah pada latar belakang masalah penelitian, agar dapat

²² Rukin . *Metode Penelitian Kuantitatif*. 2019. Hal. 11

dituangkan dalam dimensi dan indikator-indikator penelitian lapangan sebagai berikut:

1. Mekanisme Perencanaan Dalam Pembangunan Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh

Tabel 3.1
Dimensi dan Indikator

No.	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Mekanisme	a. Penyusunan Program b. Penetapan Perencanaan c. Pengawasan d. pertanggung Jawaban	Pasal 21, Permendagri No. 114 Tahun 2014

Sumber : Data Diolah Tahun 2021

2. Pemerataan pembangunan yang dilakukan di Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.

Tabel 3.2
Dimensi dan Indikator

No.	Dimensi	Indikator	Sumber
2.	Pemerataan	a. Ketepatan sasaran program b. Manfaat Program	Pasal 80, ayat 4 UU. No. 6 Tahun 2014

Sumber : Data Diolah Tahun 2021

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di wilayah Kota Banda Aceh tepatnya di Kantor Gampong Geuceu Meunara berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Lr. Tgk Meunara V

Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena peneliti berasal dari wilayah atau daerah tersebut dan cukup mengetahui kondisi perkembangan pembangunan gampong di wilayah yang menjadi tujuan penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Penelitian mengenai Mekanisme Perencanaan Dalam Pembangunan Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti guna memperoleh data dan informasi yang akurat, serta informasi yang diambil dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui atau kompeten terhadap masalah yang dihadapi.

Untuk itu informan penelitian dipilih secara *purposive sampling* informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat memberikan informasi secara lengkap dan relevan dengan tujuan penelitian. Pemilihan ini dilakukan sesuai kebutuhan peneliti dalam pengumpulan data, fakta, informasi maupun dokumen lainnya yang diperlukan sehingga kesiapan penelitian (turun kelapangan, menghimpun data dan penyusunan skripsi) dianggap selesai maka proses pengumpulan data tidak lagi ditemukan informasi atau mencapai titik jenuh, maka tahapan ini peneliti tidak mencari informasi baru dan dianggap selesai (cukup), dalam kondisi penelitian dalam penelitian kualitatif pada dasarnya tidak mempersoalkan jumlah informan yang dipilih (banyak atau sedikit).

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah 10 (Sepuluh) orang yang terdiri atas:

Tabel 3.2
Informan Peneliti

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh	1 Orang
2.	Sekretaris Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh	1 Orang
3.	Kepala Urusan Perencanaan Pembangunan Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh	1 Orang
4.	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh	1 Orang
5.	Tokoh Pemuka Gampong (TPG) Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh	1 Orang
6.	Kaur PKK Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh	1 Orang
7.	Kaur Pemerintah Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh	4 Orang
8.	Masyarakat Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh	
Jumlah		10 Orang

Sumber : Data Diolah Tahun 2021

Dengan demikian Informasi yang di dapat untuk membantu dalam penelitian ini bergantung pada kemampuan peneliti dalam menggali kebutuhan data dan informasi yang dibutuhkan dari informan dan dilapangan untuk membantu kesempurnaan karya ilmiah secara akurat sehingga dapat dijadikan sebagai referensi berikutnya.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Untuk memenuhi starisasi penelitian sebagaimana di jelaskan oleh Lofland dalam Maleong bahwa “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-

kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Maka jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi atas dua, yaitu :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung (Observasi) dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan dan melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian seperti data kependudukan yang ada di Kantor Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

2. Data skunder

Data skunder sebagai data yang diperoleh dilapangan berupa dokumen-dokumen data kependudukan masyarakat gampong Geuceu Meunara, risalah/catatan lainnya yang berkenaan dengan data kependudukan masyarakat Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.²³

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Maka untuk memperoleh data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung dengan orang yang menjadi nara sumber penelitian. Wawancara menggunakan instrument penelitian berupa pedoman wawancara yang memuat hal-hal yang ingin diketahui dan dibutuhkan peneliti terkait dengan permasalahan yang

²³ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2007. Hal. 157

diteliti dengan menggunakan pertanyaan terbuka sehingga informan dapat menjawab secara bebas menurut pengetahuan yang dimilikinya.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti sehingga nantinya peneliti dapat dengan mudah memperoleh keterangan yang relevan. Pada saat melakukan observasi langsung pada tempat dilakukannya penelitian, peneliti mencatat apa-apa saja yang terjadi di lapangan dan juga mengambil informasi dari dokumen-dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada, atau catatan-catatan yang tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya yang relevan dengan objek penelitian tersebut.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengutamakan pengungkapan melalui keterangan yang didukung dan ditunjang dengan data sekunder. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam penyaringan antara data yang ditubuhkan dan tidak. Setelah melakukan pengelompokan data, data tersebut dijabarkan dalam bentuk teks agar lebih mudah dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga hasil dari penelitian dapat menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penelitian.

Jika dicermati secara mendalam terhadap teknik pengumpulan data ini sebagaimana pandangan dari Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik analisis data berasal dari pengumpulan data. Sebab data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti menjadi data mati, dan data yang tersembunyi. Oleh Karena itu analisis data disini berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data tersebut.²⁴

Dalam melakukan analisis data, penulis memilih bahan acuan sebagaimana pendapat dari Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodi proses dalam analisis data terdapat beberapa tahapan yaitu :

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola dan membuang yang tidak perlu. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh daam penggalian data dilapangan .

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

3. Kesimpulan dan verifikasi

²⁴ Sandu Iyoto dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, 2015. Hal. 109

Kesimpulan dan verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulannya dari data-data yang telah diperoleh selama melakukan observasi dilapangan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melakukan perbandingan kesesuaian pernyataan subjek peneliti dengan makna yang terkandung atas konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.²⁵



²⁵ *Ibid. Hal. 122*

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota

Banda Aceh

4.1.1 Sejarah Singkat Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota

Banda Aceh

Dari cerita historis tokoh-tokoh tua Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh sudah ada sejak tahun 1980, dimana pada masa itu Gampong Geuceu Meunara masih bergabung dengan Gampong Garot dengan nama Gampong Garot Geuceu yang dipimpin oleh satu orang Keuchik dan Wakil Keuchik. Bila Keuchik terpilih berada di Gampong Geuceu Meunara maka wakilnya berada di Gampong Garot, demikian juga sebaliknya. Masing-masing Gampong tersebut mempunyai batas wilayah sendiri-sendiri. Penduduk awal di Gampong Garot / Geuceu pada masa tersebut sekitar 15 Kepala Keluarga yang terdiri dari 7 orang di Gampong Garot dan 8 orang di Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Dari sejak awal berdirinya hingga tahun 1985 Gampong Garot Geuceu termasuk dalam kemukiman Jeumpet Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya pada Tahun 1986 Gampong Geuceu Meunara beralih kepemilikan wilayahnya karena terjadi pengembangan kota Banda Aceh sehingga menjadi wilayah Kota Banda Aceh di bawah wilayah administratif Kecamatan Meuraxa. Sedangkan Gampong Garot masih tetap dibawah administrasi Kecamatan

Darul Imarah. Dalam pembangunan tersebut tidak seluruh Wilayah Gampong Geuceu Meunara masuk dalam wilayah Kota Banda Aceh, tetapi sampai batas sisi sebelah barat jalan Soekarno Hatta saja, sehingga terjadi pengurangan luas Wilayah Gampong Geuceu Meunara yang mana dulunya Dusun Melati termasuk dalam wilayah Gampong Geuceu Meunara setelah terjadi pengembangan Kota Banda Aceh maka Dusun Melati masuk ke dalam wilayah Gampong Garot Kabupaten Aceh Besar.

Selanjutnya dengan keputusan Wali Kota Banda Aceh tentang pemekaran wilayah Kecamatan Meuraxa menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Meuraxa, Jaya Baru dan Banda Raya, maka Geuceu Meunara masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Jaya Baru.

4.1.2 Letak Geografis Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Gampong geuceu meunara merupakan gampong yang terletak di sebelah selatan kecamatan Jaya Baru dengan luas wilayah 63 Ha. Adapun batas-batas Gampong geuceu meunara adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gp. Lamteumen Barat dan Geuceu Ineum
- Sebelah Selatan : Gp. Garot Kabupaten Aceh Besar
- Sebelah Barat : Gp. Garot Kabupaten Aceh Besar
- Sebelah Timur : Gp. Geuceu Ineum dan Lam Ara



Gambar 4.1 Peta Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

4.1.3 Data Pembangunan Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

4.1.3.1 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Gampong geuceu meunara mempunyai jumlah penduduk 3.902 Jiwa, yang tersebar dalam 3 Dusun dengan Perincian tabel sebagai berikut ini:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Dusun Lhok Lanta	A R - R A N Dusun Tgk. Meunara	Dusun Cot Jambe
878	89	2535
Jiwa	Jiwa	Jiwa

Sumber: Buku Profil Gampong Geuceu Meunara Tahun 2023

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Gampong Geuceu Meunara adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Gampong Geuceu Meunara
Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh**

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma	S1	S2	S3
272	97	183	1.609	218	248	23	1
Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa

Sumber: Buku Profil Gampong Geuceu Meunara Tahun 2023

**Tabel 4.3 Infrastruktur Gampong Geuceu Meunara
Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh**

No.	Infrastruktur	Jumlah	Kondisi
1.	Kantor Keuchik	1	Bagus
2.	Balai Gampong	1	Bagus
3.	BUMG	1	Bagus
4.	Meunasah	1	Bagus
5.	Pustu	1	Bagus
6.	Gedung Posyandu	3	Bagus
7.	Gedung PAUD	1	Bagus
8.	Gedung SD/Sederajat	1	Bagus
9.	Gedung TK	1	Bagus

Sumber: Buku Profil Gampong Geuceu Meunara Tahun 2023

4.1.3.2 Visi dan Misi Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan gampong. “Terwujudnya Geuceu Meunara yang mandiri dan sejahtera dengan sistem pemerintahan yang ramah dan melayani”

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, tentunya harus ditetapkan misimisi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh gampong agar tercapainya visi gampong tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat di jalankan. Sebagaimana penyusunan Visi, Misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Gampong Geuceu Meunara sebagaimana proses yang dilakukan, maka Misi Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru kota Banda Aceh adalah :

- a. Membangun Ekonomi Gampong yang mandiri.
- b. Mengembangkan dan membangun sistem pemerintahan Gampong yang transparan, akuntabel, ramah dan melayani.
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat disemua bidang.
- d. Mengembangkan pembangunan infrastruktur gampong yang mandiri dan berkualitas.
- e. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

4.1.3.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong

Untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh didukung perangkat Gampong yang berjumlah 10 orang dengan susunan seperti tabel berikut ini :

Tabel 4.4 Struktur Organisasi Pemerintah Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh 2019

No.	Nama	Jabatan
1.	Aidil Azhary, SH	Keuchik
2.	Drs. H. Ajun Baki M.Si	Ketua Tuha Peut
3.	Muhammad Rizal, ST	Imam Gampong
4.	Faurizman, SE	Sekretariat Gampong
5.	Rosha Hayati, S.Pd.i., SE, MS	Kaur Keuangan
6.	Irma Suzana, SE	Kaur Umum dan Perencanaan
7.	Kartini	Kasi Pelayanan
8.	Zenie Apriadi, A.Md	Kasi Kesejahteraan
9.	Muhammad Indra Nur'alim, SH	Kasi Pemerintahan

Sumber: Kantor Keuchik Gampong Geuceu Meunara , 2023

Pemerintah Gampong terdiri dari :

1. Keuchik

Keuchik atau kepala gampong dipilih oleh masyarakat Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) kepala gampong adalah pemerintah gampong atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

gampong. Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan gampong.²⁶

2. Sekretariat Gampong

Sekretariat gampong atau sekretaris gampong adalah perangkat gampong yang membantu kepala gampong menjalankan tugasnya. Fungsi dari sekretaris gampong meliputi menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi gampong, membantu persiapan penyusunan peraturan gampong dan bahan untuk laporan penyelenggara pemerintah gampong serta melaksanakan tugas lain yang diberikan keuchik/kepala gampong.

3. Kepala Urusan

Kedudukan kepala urusan yaitu sebagai unsur pembantu Sekretariat/sekretaris gampong dalam bidang tugasnya. Tugas utamanya yaitu menjalankan kegiatankegiatan Sekretariat gampong dalam bidang tugasnya masing-masing. Kepala Urusan di Gampong Geuceu Meunaraada 2 yaitu: Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan.

4. Kepala Seksi

Kedudukan kepala seksi yaitu sebagai unsur dari pelaksana teknis yang bertugas membantu keuchik sebagai pelaksana tugas operasional. Kepala Seksi di Gampong Geuceu Meunaraada 3 yaitu: Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa



Gambar 4.II
Struktur Organisasi Gampong Geuceu Meunara Kecamatan
Jaya Baru Kota Banda Aceh

4.2.1. Penyusunan Perencanaan Gampong

Dalam penyelenggaraan pembangunan gampong, wajib dilakukannya perencanaan pembangunan seperti perencanaan program apa saja yang menjadi prioritas dan harus dilaksanakan, sistem seperti apa yang sebaiknya di gunakan dalam pembangunan gampong, dan tentunya sumber dana nya juga harus jelas Pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Gampong Pasal 52 ayat (1) mengatakan bahwa Kepala Gampong mengoordinasikan kegiatan pembangunan Gampong yang dilaksanakan oleh perangkat Gampong dan/atau unsur masyarakat Gampong Yang berarti Keuchik / kepala gampong di tunjuk sebagai orang yang mengatur atau mengkoordinir jalannya kegiatan pembangunan gampong mulai dari perencanaan program hingga pelaksanaan. Namun demikian Keuchik/ Kepala Gampong tidak mungkin menjalankan program-program pembangunan ini

sendiri, tentunya harus melibatkan para perangkat gampong, kepala dusun, tuha pheut, imam gampong dan juga partisipasi dari masyarakat gampong itu sendiri.

Kemudian Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Gampong Pasal 55 ayat (1) menjelaskan tentang Tahapan Persiapan yang meliputi :

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Gampong melalui Musyawarah Gampong
2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Gampong
3. Pencermatan Pagu Indikatif Gampong dan penyelarasan program /kegiatan masuk ke Gampong
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Gampong
5. Penyusunan Rancangan RKP Gampong
6. Penyusunan RKP Gampong melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong
7. Penetapan RKP Gampong **جامعة الرانيري**
8. Perubahan RKP Gampong - **R A N I R Y**
9. Pengajuan daftar usulan RKP Gampong Demikianlah langkah yang harus dilakukan Gampong dalam menyusun RPJM Gampong dan RKP Gampong. Penyusunan dua materi ini adalah landasan yang akan menjadi pedoman pembangunan Gampong menuju cita-cita warga Gampong di bawah kepemimpinan Keuchiek.

Dalam hal ini, pelaksanaan dan perencanaan pembangunan gampong di laksanakan dengan mengumpulkan seluruh perangkat pemerintah gampong, pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan gampong dan juga masyarakat yang mengerti tentang pembangunan gampong kemudian dimusyawarahkan apa-apa saja yang akan dibangun di gampong tersebut. kemudian dari hasil musyawarah gampong ditetapkan pembangunan apa saja yang dibangun setelah itu dilaksanakan pembangunan tersebut.

Hal ini didukung dari penjelasan Pak Aidil Azhary, SH Keuchik Gampong Geuceu Meunara mengatakan :

“Untuk tahapan awal, kita lakukan musyawarah gampong dulu, berarti kita melibatkan para aparatur gampong, kepala dusun dan semua ketua lembaga misalnya Ketua Pemuda, Ketua PKK, Ketua Pengajian, ketua dasawisma dan kita bahaslah apa apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat gampong, apa kendala kendala dan masalah masalah yang terjadi di gampong. Nanti ada hasil yang kita dapati dari musyawarah tersebut, kita buat Musyawarah Perencanaan Pembangunan gampong/gampong kembali lagi seperti tadi kita buat suatu list apa-apa saja yang ingin di bangun, misalnya ini pembangunan jalan atau saluran air kita buat sesuai urutan. Terus dari hasil Musrembang tersebut kita sepakati di situ ada Tuha Peut jadi kalau sudah di setujui Tuha Peut baru bisa kita laksanakan.”²⁷

Dalam hal ini Bapak Aidil Azhary, SH selaku keuchik Gampong Geuce Meunara juga menjelaskan bahwa di dalam pembangunan gampong terdapat jenis-jenis pembangunan yang dilihat menurut waktunya yang pertama Perencanaan Pembangunan Gampong Jangka Menengah (RPJM) yaitu pembangunan gampong

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Aidil Azhary, Keuchik Gampong Geuceu Meunara, Kantor Keuchik Geuceu Meunara, Hari Kamis, 10.00-12.00, Kantor keuchik Gampong Geuceu Meunara

yang dilaksanakan dalam jangka 5 tahun, dilaksanakan sebelum bulan Januari yang biasa disebut dengan dengan musrembang RPJM gampong. Kedua Perencanaan Tahunan yaitu (RKPG) dilaksanakan setiap bulan Januari didalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan gampong.

Pada saat pelaksanaan musyawarah gampong sebaiknya dihadiri oleh setiap elemen masyarakat seperti aparatur gampong, Lembaga kemasyarakatan, unsur perempuan, masyarakat gampong dari berbagai latar belakang (ekonomi, pertanian, Kesehatan, lingkungan hidup, Pendidikan, dan lainnya), hingga masyarakat dari berbagai kalangan usia (generasi muda dan tua), dan tak lupa juga melibatkan kepala dusun (kadus) yang mewakili wilayah untuk mengetahui pembangunan seberti apa yang menjadi prioritas gampong sehingga pembangunan yang dilakukan menjadi merata ke seluruh masyarakat yang ada di gampong geuceu meunara.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Tuha Peut Gampong Geuceu Meunara Drs. H. Ajun Baki M.Si mengatakan:

“Baik Anggaran Dana Gampong (ADG) maupun Dana Gampong (DD) memang dipergunakan sepenuhnya untuk pembangunan gampong dan untuk kesejahteraan masyarakat gampong yang ada di Gampong Geuceu Meunara melalui berbagai macam program pembangunan maka usulan usulan dari masyarakat gampong sangat dibutuhkan untuk kita diskusikan didalam musyawarah gampong untuk menetapkan prioritas pembangunan gampong dengan tetap mengacu pada regulasi dan program pemerintah.”²⁸

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Ajun Baki M.Si, Ketua Tuha Peut Geuceu Meunara, Hari Kamis, Pukul 10.00-12.00, Kantor Keuchik Gampong Geuceu Meunara

Anggota Tuha Peut Gampong Geuceu Meunara M. Husin M:

“Sistemnya kita kan lihat misalnya di bangun paving block itu kan termasuk infrastruktur, jadi di survey dulu, di buat RAB nya orang kantor keuchik yang buat, mereka sudah ada orangnya staf kantor keuchik. Masalah bangunan itu, tentunya kan yang skala prioritas dulu yang dibuatkan, pokonya menurut ibu baguslah, masyarakat sudah merasakan pembangunan-pembangunan itu. Tahun ini masalah pembangunan di stop dulu karena ada wabah Covid.”²⁹

Dengan demikian sebelum pelaksanaan pembangunan kita harus membuat musrembang (musyawarah rencana pembangunan) agar dapat merencanakan apa saja yang akan dibangun pada tahun 2019. Pembangunan yang akan di bangun di tahun 2019 yaitu pembangunna yang menjadi prioritas dulu yang dibuat. Untuk meningkatkan pengelolaan pembangunan gampong di perlukan saran dari masyarakat agar pengelolaan pembangunan gampong ada peningkatan dari sebelumnya, hal ini senada dengan penjelasan dari salah satu warga Gampong Geuceu Meunara Ibu Hj. Suhaimi :

“Kalau saran ni biasanya harus bertanya dengan masyarakat juga kan, apa yang masyarakat itu butuhkan. Kadang-kadang bukannya fasilitas yang diberikan itu kita mau atau butuhkan, tapi ada fasilitas lain yang kita butuhkan. kadang-kadang ada masyarakat tidak memerlukan saluran air, akan tetapi memerlukan fasilitas yang lain salah satunya mungkin ada orang yang kurang mampu atap rumahnya udah bocor dan memerlukan dana untuk buat atap rumah, seperti membutuhkan bantuan seng kek

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak M. Husin m, Hari Kamis, Anggota Tuha Peut Gampong Geuceu Meunara. Pukul 10.00-12.00, Kantor Keuchik Gampong Geuceu Meunara

gitu. Cuma kadang-kadang gak ada bantuan untuk individu sendiri dia harus berkelompok kek gitu semua bisa merasakan bantuan yang diberikan.”³⁰

Terkadang pemerintah gampong memberi fasilitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jadi pemerintah harus melihat lagi apa yang masyarakat butuhkan sehingga apa yang diinginkan masyarakat itu tercapai.

4.2.2. Penyusunan Program Pembangunan.

Penyusunan program pembangunan gampong adalah program yang berkaitan dengan cara pemerintah gampong Menyusun dan melaksanakan program-program pembangunan gampong yang telah direncanakan dan disepakati bersama masyarakat gampong. Beberapa contoh Penyusunan program pembangunan gampong adalah:

1. Melaksanakan P3MD (Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Gampong) yang merupakan proses perencanaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat gampong dalam menentukan prioritas, sumber daya, dan mekanisme pelaksanaan pembangunan gampong.
2. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong (Musrenbangdes) yang merupakan forum musyawarah antara pemerintah gampong, BPD dan masyarakat gampong untuk menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan gampong.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Suhaimi. Warga Gampong Geuceu Meunara, Hari Kamis, Pukul 10.00-12.00, Kantor Keuchik Gampong Geuceu Meunara

3. Melaksanakan pembangunan secara terbuka, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan mengutamakan skala prioritas gampong dan tingkat manfaat untuk masyarakat gampong.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam penyampaian laporan akhir pelaksanaan diantaranya:

- a. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan dari pelaksanaan kegiatan keuchik disaksikan oleh Badan Permusyawaratan gampong dan unsur masyarakat gampong.
- b. Penyampaian laporan dari keuchik kepada Badan Permusyawaratan gampong tentang laporan pelaksanaan pembangunan gampong.
- c. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan gampong.

Badan Permusyawaratan Gampong, Keuchik, pelaksana kegiatan dan masyarakat gampong membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat gampong dimana hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara, dan Perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil musyawarah gampong/ Penyampaian Program Pembangunan.

Menurut Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Gampong, Pasal 1 mengatakan Perencanaan pembangunan gampong adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Gampong dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Gampong dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya gampong dalam

rangka mencapai tujuan pembangunan gampong. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan dimana sebuah rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berasal dari pemerintahan gampong, semua aparat penyelenggara, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan gampong. Akan tetapi dalam perencanaan Gampong Geuceu Meunara, keterlibatan masyarakat gampong dalam perencanaan kurang terlibat karena ada sebagian masyarakat tidak mengetahui dan tidak mengerti bagaimana perencanaan pembangunan gampong.

Hal ini senada dengan pernyataan dari salah satu warga Gampong Geuceu Meunara M. Sabirin Juned .

“Tidak, jarang dilibatkan, biasanya perencanaan pembagunan ini, orang ni udah ada tim kerjanya masing-masing kita cuma boleh mengusulkan, nanti kalau usulan kita diterima nanti orang ni ada tim kerjanya masing-masing. Waktu rapat perencanaan pembangunan ada dilibatkan maksudnya di undang tuha peut, ketua pemudanya ada sebagian, nanti ada dalam lorong ini nanti diambil 2 orang pendengar kek gitu tapi kadang-kadang kita kurang ngerti juga, yang penting kita memenuhi undangan aja seperti itu.”³¹

Dalam perencanaan pembangunan kepala dusun sudah terlibat, dari sebelum di rencanakan pembangunan sampai terlaksananya pembangunan tersebut. Misalnya jika ada saluran air yang tersumbat maka masyarakat bisa melapor ke kepala dusun

³¹ Hasil wawancara dengan bapak M. Sabirin Juned, Warga Gampong Geuceu Meunara, Hari Kamis, Pukul 10.00-12.00, Kantor Keuchik Gampong Geuceu Meunara

terlebih dahulu baru nanti jika sudah di laporkan ke kepala dusun maka di laporkan lagi ke Pak keuchik setelah itu baru di rencanakan untuk memperbaiki saluran air yang sudah rusak atau tersumbat. Pada saat rapat perencanaan pembangunan seperti musrembang gampong kepala dusun terlibat dalam musyawarah tersebut agar dapat mewakili masyarakat dalam membahas pembangunan gampong. Hal ini disampaikan oleh salah satu Kepala Dusun Gampong Geuceu Meunara mengatakan :

“Dari awal kepala dusun sudah terlibat dan sampai akhir kepala dusun terlibat dalam perencanaan pembangunan, fungsi utamanya memang kepala dusun”.

“Sistem Perencanaan Pembangunannya waktu Musrembang di panggil semua unsur yang ada di gampong misalnya ada yang dari pemerintahan gampong, kepala dusun, PKK, ada dari majelis taklim, ada dari balai pengajian, semua kader di panggil kemudian nanti mereka dikasi satu form untuk di isi apa permintaan yang akan di bangun tahun depan untuk tahun 2019, jadi nanti buatnya akhir tahun 2018. Jadi orang tu mengusul semua apa saja item-item, misalnya buat saluran air kemudian di kasi ke kantor keuchik nanti diseleksi. Nanti kan orang tu ada dapat bocoran dana berapa miliar kemudian nanti disesuaikan dengan dana yang masuk, dan ada penagihan di pembangunan 40% di pemberdayaan sekian persen, nanti orang kepala dusun ada di kasi 4 item di situ di buat skala prioritasnya yang mana, kemudian apa bila dana mencukupi dibuat semua tapi apabila dana tidak mencukupi diambil yang prioritas yang mana-mana aja yang akan di buat.”³²

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Tuha Peut Gampong Geuceu Meunara, Drs.

H. Ajun Baki M.Si mengatakan :

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Ketua Dusun Gampong Geuceu Meunara, Hari Kamis, Pukul 10.00-12.00, Kantor Keuchik Gampong Geuceu Meunara

“Perencanaannya ada Musrembang gampong, dari musyawarah pembangunna gampong itu perkampung, kumpulin tokoh-tokoh, kumpulin masyarakat yang berkompeten yang ngerti, tanyakan pendapat apa yang mereka butuhkan, dari situ nanti keluar berapa banyak lalu dari situ nanti dibawak ke musrembang kecamatan, dari kecamatan nanti di cek lagi apa yang bisa dilakukan yang cocok diselesaikan. Biasanya itu diurut ke program yang belum diselesaikan dulu, yang dahulu pernah diprogramkan sudah selesai itu masok lagi dia sisanya, nanti baru ke Musrembang daerah nah nanti baru disetujui.”³³

Kemudian untuk memperkuat kembali pernyataan di atas, peneliti juga mewawancarai salah satu anggota tuha peut mengenai perencanaan pembangunan. Maka pernyataan yang disampaikan adalah :

“Perencanaannya untuk tahun depan biasanya itu menjelang akhir tahun ini, misalnya untuk tahun 2021 jadi akhir tahun 2022 dibuat terus rapnya dan segala macam. Kemudian mintak masukan dari kepala dusun gitu, dusun ini pembangunan apa yang diinginkan, rapat dulu nanti Pak keuchiknya tanya ke kepala dusunnya, dusun ini mulia misalnya apa yang perlu, tahun ini apa yang harus kita buat setiap dusun dan setiap pemangku jabatan, misalnya PKK juga diundang, PKK untuk kedepan ini apa programnya gitu, begitu juga PAUD apa kedepan yang dibutuhkan, walaupun nanti kita masukkan berapa banyak terus nanti orang kantor keuchik melihat juga dananya, seperti ibuk bilang tadi, yang paling dibutuhkan itu dulu yang dibuat. Kayak ini kan mau dibuat tempat permainan untuk anak-anak PAUD karena itu sudah sangat dibutuhkan untuk

³³ Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Ajun Baki M.Si, Ketua Tuha Peut Geuceu Meunara, Hari Kamis, Pukul 10.00-12.00, Kantor Keuchik Gampong Geuceu Meunara

anak-anak, walaupun banyak masih kebutuhan lain-lain tapi ada skala prioritasnya.”³⁴

4.2.3 Penetapan Rencana Pembangunan Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Setelah dilakukan Musrenbang gampong dan diperoleh kesepakatan secara bersama maka tim penyusun kemudian melakukan revisi atas apa yang sudah dibahas dalam musyawarah tersebut kemudian keuchik membahas bersama raperdes tentang RPJM gampong dengan badan permusyawaratan gampong untuk dijadikan peraturan gampong. Langkah - langkah perencanaan pembangunan gampong tersebut mencerminkan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan merupakan inti dari pelaksanaan pembangunan sehingga memerlukan proses yang panjang. Proses panjang ini memperlihatkan bahwa keuchik dalam mewujudkan visi dan misinya tidak bisa berjalan sendiri, akan tetapi melibatkan masyarakat dalam proses penggalian gagasan sampai dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah gampong merupakan upaya dalam mewujudkan visi misi keuchik dengan memperhatikan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Dengan demikian diharapkan pembangunan akan semakin dapat dirasakan oleh masyarakat karena proses, pelaksanaan, evaluasi/pengawasan juga melibatkan masyarakat.

³⁴ Hasil wawancara dengan bapak M. Husin m, Hari Kamis, Anggota Tuha Peut Gampong Geuceu Meunara. Pukul 10.00-12.00, Kantor Keuchik Gampong Geuceu Meunara

4.3.1 Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran pembangunan gampong adalah sejauh mana program dan kegiatan pembangunan gampong sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat gampong, serta dapat mencapai tujuan pembangunan gampong yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan ketepatan sasaran pembangunan gampong adalah:

- a. Sasaran pembangunan gampong dan kawasan pergamponan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, prasarana dan sarana, ekonomi, sosial, lingkungan, dan pemerintahan gampong.
- b. Ketepatan sasaran pembangunan gampong harus melibatkan partisipasi masyarakat gampong dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan gampong.
- c. Ketepatan sasaran pembangunan gampong harus memperhatikan karakteristik, potensi, dan masalah gampong, serta keterkaitan gampong dengan kota dan wilayah lainnya.

Menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong menyatakan bahwa pembangunan Gampong dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan seluruh masyarakat Gampong dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan lokal sumber daya alam Gampong. Dalam pelaksanaan pembangunan di gampong diperlukan tenaga teknis untuk pengerjaannya agar pembangunan tersebut dapat dibuat dan diselesaikan dengan benar dan tepat. Kemudian Kasi

Kesejahteraan sebagai koordinator berfungsi untuk mengkoordinir jalannya pelaksanaan pembangunan.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Kepala Seksi Kesejahteraan Gampong Geuceu Meunara :

“Jadi di pembangunan, kita nanti ada tenaga teknis dari unsur fisik, tehnik dan semua unsur pembangunan. Dari RAB (rencana anggaran biaya), disusun programnya, kemudian koordinatornya Kaur Perencanaan karena perencana kegiatan dia Tenaga teknis itu pun dibuat SK dengan Pak Keuchik.”³⁵

Dalam pelaksanaan pembangunan pasti akan ada hambatan tersendiri, misalnya di gampong tersebut dibangun jalan akan tetapi pada saat mau di bangun jalan, tanah untuk membuat jalan tidak cukup harus di ambil tanah warga maka kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada warga tersebut agar pembangunan jalan bisa dilaksanakan sesuai rencana oleh pemerintah gampong. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Keuchik Gampong Geuceu Meunara Aidil Azhary, SH :

“Pada dasarnya tidak ada hambatan cuman dalam hal, misalnya kita ada kenak tanah warga, jadi sebelum kita anggarkan dananya dan sebelum kita laksanakan kita harus selesaikan terlebih dahulu masalah tersebut. Mungkin kenak tanah warga kiri dan kanan maka kita mintak sama warga bahwa ini untuk kepentingan gampong , kepentingan masyarakat bahwa akan dibangun jalan baru atau akan di lewati saluran air.”³⁶

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Seksi Kesejahteraan Gmpong Geuceu Meunara, Hari Kamis, Anggota Tuha Peut Gampong Geuceu Meunara. Pukul 10.00-12.00, Kantor Keuchik Gampong Geuceu Meunara

³⁶ Hasil wawancara dengan bapak Aidil Azhary, SH Keuchik Gampong Geuceu Meunara, Hari Kamis, Pukul 10.00-12.00, Kantor Keuchik Gampong Geuceu Meunara.

Dalam hal ini pelaksanaan pembangunan di Gampong Geuceu Meunara jika ada hambatan seperti akan di buat jalan maka harus dimusyawarahkan lagi, jalan mana yang akan di bangun dan jika tempat yang akan di buat jalan tersebut kena tanah warga maka akan di musyawarahkan lagi dengan warga. Jika warga sudah sepakat untuk memberikan sedikit tanah untuk di lewati jalan maka baru dilaksanakan pembuatan jalan tersebut. Karena pembangunan jalan untuk kepentingan gampong dan masyarakat gampong itu sendiri.

4.3.2. Pemerataan Pembangunan pada Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Sumber daya yang merupakan hajat hidup rakyat banyak harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut kemudian membentuk apa yang disebut sebagai pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan adalah proses pemerataan pembangunan untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara adil. Tujuan pemerataan pembangunan adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di mana setiap daerah di Indonesia mendapatkan pembangunan infrastruktur, bahkan di daerah terpencil sekalipun.

Pemerataan pembangunan mengembangkan infrastruktur pendidikan, sumber air, jalan, transportasi, pengelolaan sampah, telekomunikasi dan informatika, perumahan, kesehatan, ketenagalistrikan, dan infrastruktur lainnya dibangun secara merata di seluruh wilayah. Sehingga, semua warga negara dari berbagai lapisan masyarakat dan wilayah dapat merasakan hasil pembangunan yang sama tanpa perlu

melakukan urbanisasi. Mempercepat proses pembangunan. Pemerataan fasilitas dan pelayanan kesehatan.³⁷

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Keuchik Gampong Geuceu Meunara Aidil Azhary, SH :

Sekarang gampong menghadapi Covid-19 dengan dua penguatan dari pemerintah, yakni penguatan pembangunan gampong untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan penguatan kesehatan masyarakat. Infrastruktur Sosial Warga gampong bukanlah penduduk yang kebal virus, namun mereka harus tetap memproduksi hasil pertanian untuk menghidupi diri dan menyangga kehidupan sementara, hingga saat ini belum ada kebijakan yang terlihat mumpuni untuk menahan penyebaran pandemi. Kota besar istirahat sementara waktu hingga pandemi berlalu, sementara gampong dipacu untuk tetap memutar sendi-sendi ekonomi supaya bahan pangan penyangga kehidupan tidak terhenti. Menghadapi beratnya beban ini, pemerintah membekali gampong dengan protokol relawan gampong lawan Covid-19. Sayangnya, protokol yang bersifat relawan ini tak ada tambahan anggaran khusus yang disematkan, karena relawan gampong diharapkan dapat diatur bekerja tanpa digaji. Protokol ini digulirkan melalui Permen Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 8/2020 untuk menjaga dua komponen krusial, yaitu memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui PKTD dan penguatan kesehatan masyarakat gampong mencegah penyebaran Covid-19.³⁸

Melalui relawan gampong lawan Covid-19 diharapkan mampu mendukung penyebarluasan kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus secara

³⁷ Rahmadhani Penulis: Rizka Alifa Rahmadhani Editor: Alexander Haryanto Baca selengkapnya di artikel "Usaha Pemerataan Pembangunan di Desa & Kota serta Dampaknya", <https://tirto.id/ga2Z> diakses 4 Januari 2024

³⁸ Hasil wawancara dengan bapak Aidil Azhary, SH Keuchik Gampong Geuceu Meunara, Hari Kamis, 04/01/2024 Pukul 10.00-12.00, Kantor Keuchik Gampong Geuceu Meunara

terorganisir hingga gampong. Relawan gampong merupakan bagian dari pemerintah gampong ditambah pendamping yang ada di gampong, tokoh masyarakat, karang taruna, PKK, serta kader gampong lainnya. Ada sepuluh tugas yang diatur oleh pemerintah yang bisa dilaksanakan oleh relawan.

Kesepuluh tugas yang praktis tanpa bekal biaya itu hanya berharap menunggu peralihan sebagian anggaran dari dana desa yang telah digunakan untuk padat karya. Kesepuluh tugas relawan tersebut (1) Memberikan edukasi ke masyarakat tentang Covid-19; (2) Mendata penduduk rentan sakit; (3) Menyiapkan Ruang Isolasi Covid-19 di desa; (4) Menyemprotkan disinfektan dan menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan di tempat umum; (5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, dan pencegahan penyebaran wabah yang dikoordinasikan dengan Puskesmas atau tenaga-tenaga kesehatan di pergampong; (6) Menyediakan alat deteksi dini non medis berupa daftar isian/formulir sebagai pedoman wawancara atau yang diisi oleh warga sebagaimana contoh terlampir; (7) menyediakan informasi nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain; (8) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 jam); (9) Memastikan tidak ada kerumunan banyak orang; (10) Penyiapan dan penanganan logistik untuk kepentingan warga desa yang menjalani isolasi serta penyiapan logistik untuk situasi dan kondisi yang darurat, baik melalui BUMDes, lumbung gampong, dan lain-lain.

Dengan aturan ini, relawan komunitas gampong menjadi penyangga kota. Pertama, menangani pemudik yang pulang kampung dengan potensi virus Covid-19

yang dibawanya. Kedua, menjaga kesehatan warga melalui menjaga kebersihan dan jaga jarak, namun bukan menghentikan aktivitas seperti yang berlangsung di kota. Ketiga, menjaga ketahanan pangan tidak hanya bagi gampong sekaligus menyangga kehidupan kota yang tengah tertidur. Melaksanakan aturan ini, relawan gampong dapat memanfaatkan infrastruktur sosial yang telah berdiri atau kegiatan yang telah membudaya di warga gampong bahwa infrastruktur sosial bermanfaat dalam proses pembangunan. Infrastruktur sosial merupakan endowment atau hal yang sudah melekat di dalam suatu komunitas terkecil seperti gampong. Untuk kasus di Indonesia, infrastruktur sosial tercermin pada Data Potensi Desa (Podes) 2018.³⁹

4.3.3 Manfaat Program Yang Akan Dilaksanakan

Manfaat program yang akan dilaksanakan dalam pembangunan gampong tergantung pada jenis dan tujuan program tersebut. Secara umum, manfaat program pembangunan gampong adalah:

1. Membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan wilayah gampong.
2. Meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan pelayanan dasar masyarakat gampong.
3. Mempercepat pembangunan gampong pada berbagai bidang secara berkelanjutan

³⁹ Udin Suchaini analis data di Badan Pusat Statistik, berkecimpung dalam Pendataan Potensi Desa (Podes), "Memperkuat Desa di Masa Pandemi"

4. Memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama generasi muda pegunungan.
5. Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan gampong.
6. Meratakan berbagai infrastruktur dan kesenjangan yang ada di gampong
7. Berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) nasional
8. Meningkatkan manfaat dana gampong bagi warga gampong dengan menyusun rencana kerja pemerintah gampong dan anggaran pendapatan dan belanja gampong berbasis indeks gampong membangun dan SDGs gampong.

Cara masyarakat gampong memperoleh manfaat dari program pembangunan gampong adalah dengan berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program tersebut. Selain itu, masyarakat gampong juga dapat memanfaatkan sumber daya alam, sektor-sektor potensial, infrastruktur, sarana, dan prasarana yang tersedia di gampong secara produktif, efisien, dan efektif.

Masyarakat gampong juga perlu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sebagai insan pembangunan dengan mengikuti berbagai pelatihan, bimbingan, dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau mitra gampong. Masyarakat gampong juga perlu menata dan memanfaatkan tata ruang pembangunan secara optimal untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan gampong melibatkan berbagai pihak, yaitu pemerintah gampong, badan permusyawaratan gampong, masyarakat gampong, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.

Misalnya, pemerintah gampong bertanggung jawab atas penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, pengelolaan badan usaha milik gampong, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah gampong, penugasan urusan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh gampong, penataan wilayah gampong, dan pemberian alokasi dana gampong. Pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penyusunan peraturan daerah yang mengatur gampong, pembinaan peningkatan kapasitas kepala gampong dan perangkat gampong, bimbingan teknis bidang tertentu, dan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh gampong. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas penetapan kebijakan umum pembangunan gampong, penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai gampong, dan program pengembangan gampong mitra

Penerapan evaluasi pembangunan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya diukur dengan sasaran yang akan dicapai dan atas dasar hasil evaluasi dapat diambil langkah-langkah agar pelaksanaan pembangunan selanjutnya menunjang dan tidak merugikan pembangunan secara keseluruhan.

Dari hasil evaluasi pembangunan gampong di tahun 2019 tidak semua dapat dilaksanakan karena pembangunan gampong menggunakan dana gampong, anggaran

tersebut tidak semua untuk pembangunan akan tetapi untuk pemberdayaan masyarakat, pemerintahan, penanggulangan bencana darurat dan mengamponk dan lain sebagainya. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Keuchik Gampong Geuceu Meunara Aidil Azhary, SH :

“Setiap tahun dilakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan, karena gini tidak semua uang gampong untuk anggaran pemabangunan, karena pemerintah lebih mau ke pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, olah raga dan pendidikan, jadi dari anggaran itu juga kita harus mengambil untuk pembangunan. Gampong Geuceu Meunara sekitar Rp. 400.000.000 ke bawah untuk pembangunan kemudian kita bagi ke dalam 3 dusun, apa saja yang perlu memang tidak semua dusun kebutuhannya sama, ada dusun yang sudah yang gak banyak kebutuhannya. Umumnya kita bangun lorong-lorong kecil, terus tutup saluran, rehab saluran dan buat jalan baru. sedangkan yang besar-besar kita mintak bantu sama kecamatan, PEMKO, dan sama aspirasi Dewan.”⁴⁰

Pembangunan infrastruktur di Gampong Geuceu Meunara tidak selamanya berjalan sesuai dengan rencana yang di rancang karena setiap yang direncanakan pasti ada kendala-kendala dan kebutuhan warga pun berbeda-beda, jika rencana pembuatan selokan tapi warga tidak memerlukan saluran air akan tetapi gorong-gorong maka nanti pemerintah gampong akan menyesuaikan lagi rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga. Hal ini didukung oleh penjelasan dari Ketua Tuha Peut Gampong Geuceu Meunara Drs. H. Ajun Baki M.Si mengatakan :

⁴⁰ Hasil wawancara dengan bapak Aidil Azhary, SH Keuchik Gampong Geuceu Meunara, Hari Kamis, Pukul 10.00-12.00, Kantor Keuchik Gampong Geuceu Meunara

“Pembangunan infrastruktur di Geuceu Meunara tidak selamanya sesuai rencana tapi tetap ada perubahan-perubahan dan tercapai rencananya. Sesuai dengan tercapai kan beda, sesuai misalnya kita mau buat selokan pertama tiba-tiba nanti masyarakat mintak oh pak ini saya gak perlu selokan saya perlu gorong-gorong saja di rumah dia. Dia tidak semestinya sesuai rencana tapi tercapai rencananya. Walaupun dia sudah mengajukan rencana ke kecamatan tapi permintaan masyarakat harus kita penuhi.”⁴¹

Dalam membangun gampong pasti ada pembangunan yang belum selesai pada tahun 2019 misalnya, akan tetapi nanti di tahun 2020 dapat dilanjutkan lagi pembangunannya. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Ketua Tuha Peut Gampong Geuceu Meunara Drs. H. Ajun Baki M.Si :

“Semesti gampong itu lagi dibangun banyak yang belum selesai, kalau di gampong yang belum selesai banyak, seperti jalan-jalan gampong yang belum selesai seperti jalan di depan rumah kamu yang belum selesai, jalan masih banyak juga yang perlu dibenahi, seperti saluran juga masih banyak perlu di benahi.”⁴²

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu warga Gampong Geuceu Meunara , mengatakan :

“Pembangunan yang belum diselesaikan di kampung ini masjid, masjid belum selesai lagi kan, masih banyak yang harus ditambah sebab pembangunannya belum seberapa siap kan.” Ada pembangunan yang belum terselesaikan, karena setiap

⁴¹⁻³⁴ Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Ajun Baki M.Si Ketua Tuha Peut Gampong Geuceu Meunara, Hari Kamis, Pukul 10.00-12.00, Kantor Keuchik Gampong Geuceu Meunara

tahunnya dilakukan Musrembang dan didalam Musrembang direncanakan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sehingga hal-hal yang prioritas dilaksanakan tidak akan tercover di setiap tahunnya atau berlanjut.”⁴³

Jika pembangunan tidak terselesaikan sesuai dengan rencana ada upaya dari keuchik Gampong Geuceu Meunara , upaya tersebut sesuai dengan pernyataan wawancara dengan keuchik Aidil Azhary, SH:

“Kita gak bisa bilang gak selesai karena kita membuat menggunakan anggaran, misalnya ada satu jalan panjangnya lorong jalan 100 meter kita ingin membuat 60 meter, kita tetap siapkan 60 meter yang sisanya lagi kita sambung tahun depan. Berarti jika tidak selesai tahun ini bisa dilanjutkan tahun depan penyelesaian pembangunan jalan atau pun saluran.”⁴⁴

Kesimpulan dalam wawancara evaluasi pembangunan infrastruktur gampong, maka pembangunan yang ada di gampong seperti jalan dan saluran air perlu dibenahi lagi dan harus ada perubahan untuk lebih bagus lagi dalam pembangunan gampong. Pembangunan yang menjadi prioritas saja yang diselesaikan pada tahun 2019. Tapi jika ada pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun 2019 yang tidak menjadi prioritas pembangunan maka dapat dilanjutkan lagi pada tahun selanjutnya.

⁴³ Hasil Wawancara dengan bapak M. Sabirin Juned, Warga Gampong Geuceu Meunara, Hari Kamis, Pukul 10.00-12.00, Kantor Keuchik Gampong Geuceu Meunara

⁴⁴ Hasil wawancara dengan bapak Aidil Azhary, SH Keuchik Gampong Geuceu Meunara, Hari Kamis, Pukul 10.00-12.00, Kantor Keuchik Gampong Geuceu Meunara

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Gampong Geuceu Meunara, Kota Banda Aceh, dengan menggunakan Teknik Pengumpulan Data Dokumentasi, Observasi, dan Wawancara maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam mekanisme perencanaan dalam pembangunan Pemerintah gampong sudah melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan dan perencanaan pembangunan infrastruktur gampong. Dimana pembangunan gampong di laksanakan dengan mengumpulkan seluruh perangkat pemerintah gampong, baik pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan gampong dan juga masyarakat yang mengerti tentang pembangunan gampong kemudian dimusyawarahkan apa-apa saja yang akan dibangun di gampong. Namun masyarakat gampong relatif kurang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Gampong Geuceu Meunara.
2. Mekanisme pengelolaan pembangunan infrastrukturnya yaitu terdapat tahapan-tahapan yaitu perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi pembangunan. Sebelum pembangunan gampong dilaksanakan, keuchik mengumpulkan seluruh perangkat Gampong Geuceu Meunara dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur gampong melalui musyawarah gampong. Pembangunan infrastruktur di Gampong Geuceu Meunara tidak selamanya berjalan sesuai dengan rencana yang di rancang

karena setiap yang direncanakan pasti ada kendala-kendala dan kebutuhan warga pun berbeda-beda.

3. Pemerataan pembangunan yang dilakukan di Gampong Geuceu Meunara
Ketepatan sasaran pembangunan gampong adalah sejauh mana program dan kegiatan pembangunan gampong sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat gampong, serta dapat mencapai tujuan pembangunan gampong yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Pemerintah Gampong dan dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan seluruh masyarakat Gampong dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan lokal sumber daya alam Gampong. Dalam pelaksanaan pembangunan di gampong diperlukan tenaga teknis untuk pengerjaannya agar pembangunan tersebut dapat dibuat dan diselesaikan dengan benar dan tepat. Kemudian Cara masyarakat gampong memperoleh manfaat dari program pembangunan gampong adalah dengan berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program tersebut. Selain itu, masyarakat gampong juga dapat memanfaatkan sumber daya alam, sektor-sektor potensial, infrastruktur, sarana, dan prasarana yang tersedia di gampong secara produktif, efisien, dan efektif. Masyarakat gampong juga perlu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sebagai insan pembangunan dengan mengikuti berbagai pelatihan, bimbingan, dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau mitra gampong. Masyarakat gampong juga perlu menata dan memanfaatkan tata ruang pembangunan secara optimal untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

5.2. Saran

Berdasarkan pengalaman di lapangan dan informasi yang diperoleh, kiranya peneliti dapat memberikan saran dan rekomendasi berikut.

1. Pemerintah Gampong Geuceu Meunara , untuk lebih memantau dan melihat kembali pembangunan apa saja yang belum terselesaikan dan dapat diselesaikan. Tuha Peut dan Kepala Dusun diharapkan untuk lebih berperan lagi dalam hal pengawasan pembangunan gampong.
2. Masyarakat gampong diharapkan agar lebih aktif dan ikut serta dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat gampong juga ikut serta memantau, mengawasi, perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah gampong.
3. Pembangunan infrastruktur gampong yang dilakukan harus benar-benar kebutuhan masyarakat Gampong Geuceu Meunara



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Stie Ykpn.
- Ana Sopanah dkk. 2020. *Isu Kontemporer Akutansi Publik*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka
- Bonaraja Purba dkk. 2021. *Ekonomi Pembangunan* .Yayasan Kita Menulis
- Fandi, Sagai, 2014. *Peran Pemerintah Gampong Dalam Pembangunan Infrastruktur*. Erlangga: Jakarta
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mirza Fanzikri. (2019). *Integritas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Gampong*. Kontruksi Administrasi Publik. Hal-93-121. Banda Aceh : UIN Ar-raniry
- Nazir,M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rukin . 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmad Cendikia Indonesia
- Kartono, Drajat Tri dan Hanif Nurcholis. *Modul Pembangunan Masyarakat Gampong dan Kota* AR - RANIRY
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.nm _____ 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Jurnal :

Ayu Rosita. 2021. *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pegampongan Di Kabupaten Bone*. Makassar

Muhammad Rizki, Murdiansyah Herman, Fika Fibriyanita Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pegampongan (Studi Kasus : Gampong Pangkalan Rekan Muara Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas). Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip

Sandu Siyato dan M.Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing.

Tripa Sulaiman. 2019 *Rekonstruksi Pemerintahan Gampong* .Banda Aceh : Bandar Publishing

Undang-Undang/Qanun :

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong

Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Gampong

Website :

<https://kumparan.com/feradis-nurdin/perencanaan-pembangunan-gampong-selasa-18/10/22>

<https://sidanegara.gampong.id/index.php/artikel/2021/2/18/pembangunan-gampong-tahapannya> diakses 20 oktober 2022 R Y

<https://repository.uinuska.ac.id/16332/8/7.BABLANDASANTEORI.pdf> Diakses 20 oktober 2022

A Halim Iskandar, *SDGs GAMPONG : Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan* (20:Buku Obor, 2020), <https://books.google.co.id/booksgampong>. Diakses 20 oktober 2022

Dwi Agus Prastiwi et al., *Indeks Pembangunan Gampong 2018*, ed. Masfufah, Tri Suryaningsih, and Akhsan Naim (Indonesia: Badan Pusat Statistik, 2019). Diakses 20 oktober 2022

Arlan, A. S. B. (2019). Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMDES) di Gampong Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. *Al'iidara Balad*, 2(1), 37-44.

Arif Zainudin 1) *, Sri Sutjiatmi 2) Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Gampong Pengabean dan Gampong Karanganyar) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal. Submission: 31-07-2017; Revision: 26-02-2018; Publish: 30-05-2018 DOI: <http://dx.doi.org/10.24905/jip.v3i1.710>. Diakses 20 oktober 2022

Wikipedia, Pembangunan Nasional Indonesia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembangunan_nasional_indonesia_ Diakses 20 Oktober 2022



LAMPIRAN

SK PEMBIMBING



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2245/Un.08/FISIP/Kp.07.6/11/2023

TENTANG
PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan, b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh ; 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry; 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KM.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum; 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU); 12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **08 Juli 2021**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Dr. Mahmuddin, M.Si.	Sebagai pembimbing I
2. Muazzinah, B.Sc., MPA.	Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Almira Raihan
 NIM : 170892009
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Mekanisme Perencanaan dan Pembangunan Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 23 November 2023
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

DOKUMENTASI



WAWANCARA DENGAN KASI KESEJAHTERAAN



WAWANCARA DENGAN KASI PEMERINTAHAN



WAWANCARA DENGAN KEUCHIK



WAWANCARA DENGAN SEKDES



WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT



RIWAYAT HIDUP



I.

IDENTITAS DIRI

Nama : Almira Raihan
 Tempat /Tanggal Lahir : Banda Aceh, 26 April 1999
 Jenis Kelamin/Agama : Perempuan / Islam
 Status Perkawinan : Lajang
 Alamat Domisili : Jl. Soekarno Hatta, Lr. Tgk. Meunara V, Geuceu Meunara,
 Banda Aceh .
 No HP : 085361209510 (WA)
 E-mail : almira.raihan2699@gmail.com

II.

DATA ORANG TUA

Nama ayah : Rusli
 Pekerjaan : Supir
 Nama Ibu : Sri Afnidar
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga